

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DPRD Minta Penjelasan Soal Penambahan Anggaran Bansos

Sebanyak 166 lembaga dan ayaysan terdaftar sebagai penerima bantuan keuangan dan hibah.

### Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

**JAKARTA** — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akan meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi DKI ihwal alokasi dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Alokasi anggaran yang terdapat dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 itu meningkat, tapi belum ada rinciannya.

“Cuma terlihat angkanya meningkat. Tentu kami ingin tahun detailnya,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gembong Warsono, kemarin. Menurut dia, dokumen umum KUA-PPAS 2020 barus saja diterima anggota Dewan. “Jadi, belum ada yang bisa dikoreksi dari rencana Pemprov DKI itu.”

Dalam dokumen KUA-PPAS 2020, pemerintah Jakarta mencantumkan anggaran belanja hibah naik Rp 546,8 miliar, dari

Rp 2,3 triliun menjadi Rp 2,84 triliun. Nominal anggaran belanja bantuan sosial juga meningkat dari Rp 4,46 triliun menjadi Rp 4,8 triliun. Sedangkan anggaran belanja bantuan keuangan justru berkurang hingga Rp 214,4 miliar, dari Rp 846,4 miliar menjadi Rp 631,9 miliar.

“Tentu kami (DPRD) ingin semua keputusan dapat memberikan efek yang positif dan maksimal,” ujar Gembong.

Gubernur DKI Anies Baswedan pada 13 Februari lalu telah meneken Keputusan Gubernur Nomor 209 Tahun 2019 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan. Dalam dokumen tersebut tercatat bahwa bantuan keuangan dan hibah diberikan kepada 166 lembaga dan yayasan. Sedangkan dana bantuan sosial digelontorkan bagi 52 organisasi masyarakat dan yayasan.

Berdasarkan dokumen yang sama, pemerintah DKI juga memberikan bantuan keuangan kepada sem-

bilan fraksi partai politik di DPRD sebesar Rp 10,6 miliar. Bantuan juga diberikan kepada pemerintah daerah di sekitar Ibu Kota, yaitu Kota Bekasi senilai Rp 756,9 miliar, Kota Depok Rp 38 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 25 miliar, Kabupaten Bekasi Rp 8,45 miliar, dan Kabupaten Bogor Rp 7,4 miliar.

Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Taufan Bakri, menyatakan tak ada anggaran bantuan sosial dan hibah yang bertambah bagi organisasi masyarakat. Menurut dia, potensi kenaikan ada di pos bantuan keuangan kepada 10 partai politik di DPRD. Nilai bantuan itu sebesar Rp 2.400 per suara. “Berdasarkan aturan dimungkinkan untuk bertambah. Tapi saat ini masih sama (Rp 2.400),” kata Taufan.

Taufan menegaskan semua penerima dana bantuan akan dibuka ke publik. Pemberian bantuan ini dipastikan melewati proses

pemeriksaan dan verifikasi. “Ada semua datanya. Itu pasti. Ada laporannya,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah, mengatakan instansinya masih membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendapat bantuan sosial pada 2020. Pendaftaran dibuka di tingkat kecamatan dan kelurahan. “Perlu ada *update* BDT (basis data terpadu), sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran,” ucapnya. “Nanti ada tahap verifikasi.”

Ketua DPRD sementara, Pantas Nainggolan, menuturkan anggota parlemen masih berfokus pada pembahasan tata tertib dan penyusunan pimpinan definitif. Menurut dia, agenda pembahasan anggaran akan dimulai setelah semua alat kelengkapan Dewan rampung. “Awal Oktober harapannya sudah ada pimpinan definitif. Setelah itu, semua pembahasan bisa dimulai,” kata dia.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DPRD Minta Penjelasan Soal Penambahan Anggaran Bansos

### Telah Disetujui

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyetujui alokasi dana hibah dan bantuan keuangan senilai Rp 3,14 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019. Anggaran tersebut ditujukan kepada 166 lembaga dan yayasan. Pemerintah DKI juga mengalokasikan anggaran bantuan sosial kepada 52 organisasi masyarakat dan yayasan senilai Rp 4,46 triliun.

#### Dana Hibah dan Bantuan Keuangan

- ▶ **Badan Kepegawaian Daerah**
  - Jumlah: 4 lembaga
  - Nilai: Rp 5,9 miliar
- ▶ **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
  - Jumlah: 8 lembaga dan 9 partai politik
  - Nilai: Rp 28,8 miliar
- ▶ **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
  - Jumlah: 1 lembaga
  - Nilai: Rp 4,12 miliar
- ▶ **Biro Hukum**
  - Jumlah: 1 lembaga
  - Nilai: Rp 2,17 miliar
- ▶ **Biro Pendidikan dan Mental Spiritual**
  - Jumlah: 94 lembaga dan yayasan
  - Nilai: Rp 205,7 miliar
- ▶ **Biro Tata Pemerintahan**
  - Jumlah: 2 lembaga dan 5 pemerintah daerah
  - Nilai: Rp 841,7 miliar
- ▶ **Dinas Cipta Karya**
  - Jumlah: 1 lembaga
  - Nilai: Rp 111,29 miliar
- ▶ **Dinas Kesehatan**
  - Jumlah: 3 lembaga
  - Nilai: Rp 20,09 miliar
- ▶ **Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik**
  - Jumlah: 2 lembaga
  - Nilai: Rp 14,8 miliar
- ▶ **Dinas Koperasi dan UKM**
  - Jumlah: 2 lembaga
  - Nilai: Rp 2,5 miliar
- ▶ **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
  - Jumlah: 5 lembaga
  - Nilai: Rp 35,1 miliar
- ▶ **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
  - Jumlah: 2 lembaga
  - Nilai: Rp 1,9 miliar

#### ▶ Dinas Pemuda dan Olahraga

- Jumlah: 7 lembaga
- Nilai: Rp 257,9 miliar
- ▶ **Dinas Pendidikan**
  - Jumlah: 13 lembaga dan yayasan
  - Nilai: Rp 1,54 triliun
- ▶ **Dinas Perindustrian dan Energi**
  - Jumlah: 1 lembaga
  - Nilai: Rp 7,5 miliar
- ▶ **Dinas Sosial**
  - Jumlah: 1 lembaga
  - Nilai: Rp 600 juta
- ▶ **Satuan Polisi Pamong Praja**
  - Jumlah: 3 lembaga
  - Nilai: Rp 62,5 miliar

#### Dana Bantuan Sosial

- ▶ **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
  - Jumlah: 4 ormas
  - Nilai: Rp 550 juta
- ▶ **Dinas Pendidikan**
  - Jumlah: siswa SD-SMA/SMK dan mahasiswa
  - Nilai: Rp 4,1 triliun
- ▶ **Dinas Sosial**
  - Jumlah: 46 ormas dan yayasan
  - Nilai: Rp 343,7 miliar

● SUMBER: KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 209 TAHUN 2019